

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Sofyan. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenamedia Group. Makassar.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet.Kedua. Kencana. Jakarta.
- Edi Slamet Irianto & Syarifuddin Jurdi. 2005. *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2000. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT Rajawali Press. Jakarta.
- Hasbullah F.Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Mediaq. Jakarta.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghlmia Indonesia. Bogor.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Prktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Husada. Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I*. Almunir. Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Peter Mahkum Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Riduan Syahrini. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan; Teori dan Kasus*, Salemba Empat. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sonny Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu*. Kencana. Jakarta.
- Sudikno Mortokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta.
- Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Indeks. Jakarta Barat.

Ziski Azis dkk. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. CV Madenatera. Medan.

JURNAL DAN SKRIPSI:

Anggun Sulistio Kartawijaya. 2017. *Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Skripsi. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Dila Ayu Pritalangi. Srikandi Kumadji. Bambang Ismono. 2014. *Analisis Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan PPh (Studi Pada Wajib Pajak Pensiunan Di KPP Pratama Malang Utara)*. Jurnal Perpajakan. Vol. 3 No. 1 Desember.

M. Hamdan. 2010. *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 4 Oktober-Desember.

Muhammad Afdol. 2017. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Analisis Putusan MA No: 12/Pid.B/2013/PN.MSH)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

INTERNET:

Badan Pusat Statistik. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 15.00 WITA.

Kezia Rafinska. Dasar Hukum PPN. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/dasar-hukum-ppn>. diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 06.00 WITA.

Online Pajak. *PPh Terutang: Dasar Hukum, Tarif dan Contoh Perhitungan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pph-terutang>. diakses pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 06.00 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pengadilan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Mks.